



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI  
DALAM RANGKA PENINJAUAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
BENDUNGAN JATIGEDE, KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT  
TANGGAL 13 NOVEMBER 2024**

---

Komisi V DPR RI melaksanakan Kunker Spesifik ke Bendungan Jatigede Kab Sumedang Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 November 2024, yang dipimpin oleh **Bapak H. SYAIFUL HUDA, S.I.Kom.,M.K.P, Fraksi Partai PKB Dapil Jabar VII** dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi V DPR RI dari berbagai Fraksi. Kunfik tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan bendungan Jatigede.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke ruang kontrol sistem Bendungan Jatigede. Ruang kontrol tersebut berfungsi mengendalikan banjir dan kekeringan. Ruang kontrol bendungan juga berfungsi untuk mengatur pelepasan air berlebihan yang masuk ke bendungan. Selanjutnya Komisi V DPR RI melakukan pertemuan bersama para SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Staf Ahli Bupati Indramayu, SKPD Kabupaten Sumedang dan dihadiri oleh mitra kerja Komisi V DPR RI yakni Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam pertemuan tersebut Komisi V DPR RI membahas beberapa hal di antaranya:

- 1). Warga kecamatan Jatigede, sebagai masyarakat yang paling terdampak akibat pembangunan waduk Jatigede, justru mengalami kesulitan untuk mengakses air baku. Bahkan desa-desa yang berada di bibir waduk, harus secara swadaya mengadakan pompa air untuk mendapatkan air.
- 2). Ada beberapa warga Kecamatan Jatigede yang masih belum menerima penyelesaian ganti rugi akibat pembebasan lahan pembangunan waduk Jatigede.
- 3). Warga Jatigede memerlukan pelatihan kerja akibat peralihan jenis pekerjaan dari petani ke penggerak wisata atau UMKM.
- 4). Warga Jatigede mengkhawatirkan, jika pengadaan air minum diserahkan kepada PDAM, maka akses terhadap air minum akan berbayar.
- 5) Sebagai Objek Vital Nasional dan Proyek Strategis Nasional (PSN), kebutuhan akses jalan ke Bendungan Jatigede sangat mendesak baik dari segi keamanan, mitigasi bencana, dan akses pengembangan pariwisata.

Komisi V DPR RI meminta kepada Camat Kecamatan Jatigede untuk segera mendata warga yang belum menerima penyelesaian ganti rugi serta mendata warga yang terdampak peralihan jenis pekerjaan. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen SDA Kementerian PU untuk segera menyelesaikan masalah kesulitan air; ganti rugi lahan masyarakat dan peralihan jenis pekerjaan warga Kecamatan Jatigede. Hal ini dilakukan dengan melakukan pelatihan dan pemberdayaan, termasuk juga segera mengendalikan pintu air dan penyadapan dari saluran irigasi dengan cara digitalisasi kontrol pintu air untuk mengantisipasi adanya **Mafia Air**.

Terkait PLTS yang berpotensi sebagai sumber energi listrik, saat ini masih belum bisa direalisasikan karena terkendala anggaran. Dari hasil studi sementara diperoleh bahwa 1 ha PLTS berpotensi menghasilkan 1 Megawatt listrik. Untuk pembiayaan, Komisi V menyarankan menggunakan model KPBU.

Terkait beberapa ruas jalan menuju ke Bendungan dan masalah lainnya, Komisi V DPR RI akan membahas lebih lanjut bersama Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU. Hal ini nantinya agar dapat ditindaklanjuti dalam rangka mendorong destinasi wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

**Sumedang, 13 November 2024**

**Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Sumedang**

